



Pembacaan Semiotik terhadap Representasi Bencana Alam Sumatra di Media Sosial

Mimah Nur Baiti

1) Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar mitos bencana alam di Sumatra melalui representasi visual dan naratif di media sosial. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis semiotika Roland Barthes, penelitian ini membedah bagaimana unggahan publik mengenai banjir, kebakaran hutan, dan konflik satwa liar tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi sebagai kritik struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publik melakukan dekonstruksi terhadap narasi pemerintah yang menganggap bencana sebagai peristiwa "tak terduga" menjadi narasi "kegagalan sistemik" melalui pemaknaan konotatif dan mitologis.

Kata Kunci: Semiotika, Roland Barthes, Media Sosial, Bencana Sumatra, Akar Struktural.

Abstract

This study aims to debunk the myths of natural disasters in Sumatra through visual and narrative representations on social media. Using a qualitative method with Roland Barthes' semiotic analysis, this research examines how public posts about floods, forest fires, and wildlife conflicts not only serve as documentation but also as structural criticism. The results show that the public deconstructs the government's narrative, which considers disasters as "unforeseen" events, into a narrative of "systemic failure" through connotative and mythological meanings.

Keywords: Semiotics, Roland Barthes, Social Media, Sumatra Disasters, Structural Roots.



PENDAHULUAN

Sumatra saat ini berdiri di persimpangan kritis antara ambisi pembangunan ekstraktif dan daya dukung lingkungan yang kian rapuh. Sebagai salah satu pulau dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Sumatra juga menjadi episentrum kehilangan tutupan hutan yang masif di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor meningkat secara signifikan, namun terdapat ketegangan yang nyata dalam cara peristiwa ini didefinisikan di ruang publik. Pemerintah dan otoritas sering kali menyandarkan penjelasan bencana pada faktor-faktor eksternal yang tidak terkendali, seperti intensitas curah hujan ekstrem akibat fenomena Siklon Tropis atau perubahan iklim global. Strategi komunikasi ini secara semiotis bekerja untuk menaturalisasi bencana, mengubahnya dari konsekuensi kebijakan menjadi peristiwa alam yang tak terelakkan.

Namun, di era digital, monopoli makna oleh negara kini ditantang oleh narasi-narasi warga yang tersebar di media sosial. Platform digital telah bertransformasi menjadi laboratorium semiotika di mana setiap foto, video, dan teks yang diunggah oleh masyarakat terdampak berfungsi sebagai tanda yang membawa muatan politis. Ketika warga mengunggah visual kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di Batang Toru atau Aceh, tanda visual tersebut tidak hanya merepresentasikan "kerusakan", tetapi secara konotatif menunjuk pada aktivitas pembalakan liar atau pembukaan lahan di hulu sungai yang selama ini tersembunyi dari narasi resmi. Inilah yang disebut sebagai perjuangan representasi, makna bencana diperebutkan antara mereka yang ingin menjaga status quo kekuasaan dan mereka yang menuntut keadilan ekologi.

Data statistik menunjukkan urgensi dari penelitian ini. Antara tahun 2014 hingga 2024, provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara kolektif telah kehilangan sekitar 3,68 juta hektare hutan alam. Pada tahun 2025, Sumatra bahkan menyali Borneo sebagai hotspot utama deforestasi nasional. Kehilangan tutupan hutan adalah hasil dari keputusan politik yang memberikan izin konsesi tambang, HGU sawit, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada ratusan korporasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari perspektif ekologi politik, bencana di Sumatra adalah hasil kerja terstruktur negara dan modal yang kemudian dibungkus dengan bahasa yang netral.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk membedah mekanisme penandaan di media sosial melalui kacamata semiotika Roland Barthes. Barthes memberikan perangkat analitis untuk melihat sebuah tanda dapat berubah menjadi mitos yang bertujuan untuk memberikan pembenaran alami terhadap intensi historis. Dengan menganalisis publik membaca tanda-tanda visual bencana di media sosial, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap cara publik membongkar akar bencana yang bersifat struktural. Analisis ini sangat krusial di tengah upaya "depolitisasi bicara" oleh pejabat publik yang sering kali menyalahkan hujan atau takdir untuk menutupi jejak kebijakan yang melahirkan kerentanan ekologis tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan metode analisis semiotika Roland Barthes. Metode deskriptif kualitatif adalah melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan (Sugiyono, 2017).

Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan kedalaman interpretasi terhadap teks dan gambar dalam konteks sosialnya yang kompleks.

Objek penelitian adalah unggahan di media sosial (Instagram, Facebook, dan X/Twitter) yang berkaitan dengan peristiwa bencana alam besar di Sumatra antara tahun 2023 hingga 2025. Data yang dikumpulkan meliputi: 1) Penanda Visual: Foto-foto banjir bandang, tanah longsor, kerusakan infrastruktur, dan konflik satwa liar (seperti gajah Tesso Nilo), 2) Penanda Verbal: Caption unggahan, komentar netizen, serta narasi yang dibangun oleh akun-akun media berita warga dan lembaga swadaya masyarakat (seperti WALHI).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi digital dan observasi online. Peneliti melakukan penyaringan konten menggunakan kata kunci strategis seperti "Banjir Sumatra", "Save Tesso Nilo", "Penyebab Banjir Sumut", dan "Deforestasi Sumatra". Sebanyak 60 unit analisis dipilih berdasarkan tingkat interaksi (engagement) yang tinggi dan relevansi muatannya terhadap isu akar struktural bencana.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan utama yang diadaptasi dari model Barthes dan Eriyanto, yaitu 1) Identifikasi Tanda: Menguraikan elemen-elemen visual (sudut pandang, warna, objek) dan verbal (pilihan diksi, gaya bahasa) pada unit analisis, 2) Analisis Denotatif: Menjelaskan makna literal dan deskriptif dari tanda-tanda yang diidentifikasi untuk membentuk basis data faktual, 3) Analisis Konotatif: Menafsirkan makna lapis kedua dengan mengaitkan tanda-tanda tersebut dengan pengetahuan sosiokultural dan kondisi ekologi politik di Sumatra, dan 4) Analisis Mitos dan Ideologi: Mengungkap narasi besar atau mitos yang bekerja di balik representasi tersebut, serta bagaimana tanda-tanda tersebut memperkuat atau menantang ideologi dominan mengenai bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Visual Banjir Sumatra: Tanda Kerusakan Struktural

Dalam pengamatan terhadap unggahan media sosial mengenai banjir bandang di Sumatra Utara dan Aceh, ditemukan pola penandaan visual yang konsisten berupa massa kayu gelondongan yang teronggok di sela bangunan yang hancur. Secara denotatif, tanda ini merepresentasikan material kayu tanpa ranting yang terbawa arus air. Namun, pada tingkat konotasi, keberadaan kayu ini dibaca oleh netizen sebagai jejak nyata dari aktivitas penebangan hutan secara ilegal atau masif di wilayah hulu DAS. Lumpur berwarna coklat pekat yang menutupi pemukiman juga berfungsi sebagai tanda indeksikal yang menunjuk pada hilangnya tutupan vegetasi dan rusaknya stabilitas tanah akibat deforestasi.

Melalui repetisi tanda visual ini, publik membangun mitos tandingan yang menolak narasi musibah alam. Kayu gelondongan tersebut berubah menjadi barang bukti dalam wacana publik, mengonstruksi mitos bahwa bencana di Sumatra adalah produk kejahatan ekonomi dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan struktural. Kris Budiman menegaskan bahwa visual adalah teks yang dapat dibaca, dan dalam konteks ini, masyarakat membaca infrastruktur yang putus sebagai simbol kelumpuhan total ekonomi akibat pengabaian aspek mitigasi jangka panjang oleh otoritas.

Data statistik memperkuat signifikansi penanda visual ini sebagai representasi krisis sistemik. Antara tahun 2014 hingga 2024, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

secara kolektif telah kehilangan sekitar 3,68 juta hektare hutan alam. Pada tahun 2025, Sumatra bahkan melampaui Borneo sebagai hotspot utama deforestasi nasional. Realitas material ini menjelaskan mengapa visual kayu gelondongan begitu masif muncul di media sosial; riset dari BRIN menunjukkan bahwa kawasan yang kehilangan tutupan hutan antara 20% hingga 30% di wilayah DAS memiliki risiko tiga kali lipat mengalami banjir bandang. Dengan demikian, foto-foto yang diunggah publik bukan sekadar rekaman bencana, melainkan dokumentasi atas hilangnya daya serap air akibat kerusakan struktural yang bersifat masif dan terencana.

Secara semiotis, keberadaan tanda-tanda visual ini bekerja sebagai bentuk "interogasi terhadap citra" yang memaksa audiens bergerak dari level denotasi menuju konotasi politik yang lebih dalam. Barthes menekankan bahwa fungsi utama mitos adalah melakukan depolitisasi terhadap pembicaraan dengan cara mengosongkan realitas dari sejarahnya. Ketika otoritas menggunakan narasi musibah untuk menjelaskan banjir di Sumatra, mereka sedang berupaya mengubah hasil kerja terstruktur negara dan modal menjadi sekadar fenomena alam yang netral. Namun, representasi publik di media sosial yang mengganti istilah "bencana alam" menjadi bencana ekologis menunjukkan adanya perjuangan untuk mengembalikan muatan sejarah dan tanggung jawab manusia ke dalam peristiwa tersebut, sehingga menolak penaturalisasian krisis yang tengah terjadi.

Konflik Gajah Tesso Nilo: Ikonisitas Kepunahan dan Dominasi Modal

Krisis ekologi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, direpresentasikan melalui tanda-tanda yang sangat emosional di media sosial. Secara statistik, publik menyoroti penyusutan hutan yang kini hanya tersisa 12.561 hektare, sementara ekspansi sawit ilegal telah mencapai luasan masif sekitar 40.000 hektare. Kematian gajah Rahman yang diracun pada Januari 2024 menjadi tanda ikonik dari hancurnya ruang hidup satwa liar. Sejak tahun 2015, tercatat sebanyak 23 gajah mati di kawasan ini akibat kerusakan habitat, keracunan, maupun jerat pemburu.

Secara semiotis, kematian massal ini merepresentasikan kesenjangan yang ekstrem antara kebutuhan biologis satwa dan realitas spasial yang tersedia. Seekor gajah Sumatra membutuhkan ruang jelajah antara 20.000 hingga 100.000 hektare untuk pakan dan pergerakan, sehingga populasi 150 gajah di TNTN idealnya membutuhkan ruang seluas 140.000 hingga 160.000 hektare. Namun, dengan hutan yang tersisa hanya sekitar 12.000 hektare, visual gajah yang masuk ke pemukiman warga di media sosial berfungsi sebagai indeks dari ruang hidup yang telah terfragmentasi habis oleh kepentingan industri sawit.

Analisis terhadap konflik ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut Ann L. Stoler sebagai perspektif perkebunan. Logika kekuasaan ini memandang lanskap sebagai zona produksi yang harus didisiplinkan dan disubordinasikan demi komoditas global. Dalam narasi media sosial, tanda sawit ilegal seluas 40.000 hektare di dalam taman nasional membongkar mitos kedaulatan hukum negara; ia menunjukkan bahwa "pusat komando" ekonomi sering kali memiliki otoritas yang lebih nyata di lapangan dibandingkan status konservasi yang diberikan oleh hukum negara.

Konflik sosial yang pecah pada November 2025, memperlihatkan sekelompok warga merusak pos komando taman nasional sebagai respons terhadap rencana relokasi,

menambah lapisan kerumitan tanda dalam penelitian ini. Peristiwa ini menunjukkan adanya fragmentasi makna di media sosial; di satu sisi, gajah mati direpresentasikan sebagai korban kejahatan ekologis, namun di sisi lain, warga yang mengelola lahan sawit ilegal memandang diri mereka sebagai entitas yang memperjuangkan kelangsungan ekonomi keluarga. Praktik penandaan ini mengungkap bahwa bencana di Tesso Nilo bukan hanya soal kepunahan spesies, melainkan kegagalan sistemik dalam integrasi kebijakan tata ruang, pengamanan hutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.

Mendekonstruksi Mitos Depolitisasi Negara melalui Repolitisasi Publik

Analisis terhadap cara pemerintah membingkai bencana menunjukkan upaya naturalisasi yang kuat dengan menggunakan diksi musibah atau faktor cuaca ekstrem seperti Siklon Tropis Senyar. Dalam perspektif Barthes, ini adalah upaya depolitisasi untuk menghapus jejak sejarah kebijakan perizinan. Namun, media sosial memfasilitasi narasi tandingan yang menggeser atribusi penyebab dari fenomena cuaca menuju akar struktural, seperti keberadaan 631 konsesi tambang dan sawit di wilayah hulu yang menjadi pemicu utama kerentanan.

Penggunaan istilah bencana alam oleh otoritas dapat dipahami melalui konsep *discursive framing* yang dikemukakan Arturo Escobar, penamaan peristiwa digunakan secara strategis untuk menutupi akar struktural kerusakan. Dengan menyebutnya sebagai fenomena yang netral dan tak terelakkan, negara berupaya membatasi fokus publik hanya pada aspek kemanusiaan dan bantuan darurat, bukan pada kebijakan ekstraktif yang menjadi penyebabnya.

Namun, melalui media sosial, narasi tandingan yang dipopulerkan oleh kelompok sipil seperti WALHI dengan menggunakan istilah "bencana ekologis" (*ecological disaster*) secara efektif melakukan repolitisasi. Perubahan terminologi ini bukan sekadar permainan kata, melainkan sebuah upaya untuk mengembalikan agensi manusia dan tanggung jawab politik ke dalam ruang publik, sehingga memaksa audiens untuk melihat bencana sebagai konsekuensi dari pilihan politik yang sadar.

Selain itu, media sosial berperan penting dalam memecah apa yang disebut sebagai "kesunyian ekologis" (*ecological silences*) yang sering ditemukan dalam jurnalisme arus utama. Husni (2025) mencatat bahwa media konvensional cenderung memiliki ketergantungan pada narasi pemerintah dan sumber resmi, yang sering kali mengabaikan penggerak sistemik seperti pengaruh korporasi atau kegagalan regulasi.

Di ruang digital, jurnalisme warga dan platform aktivisme membongkar batasan tersebut dengan menonjolkan data lapangan yang tidak tersaring, memaksa negara berada di persimpangan antara menjaga legitimasi politik melalui simbol kepedulian atau menghadapi akuntabilitas struktural yang nyata. Tekanan publik yang konstan di media sosial ini meruntuhkan mitos gotong royong yang sering digunakan negara untuk mencuci tangan, dan menggantinya dengan tuntutan audit perizinan serta penegakan hukum lingkungan yang lebih keras.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi bencana alam di Sumatra melalui media sosial bukan sekadar dokumentasi peristiwa, melainkan sebuah medan perjuangan semiotis yang kompleks. Dengan menggunakan pisau analisis Roland Barthes, penelitian ini berhasil mengungkap bagaimana publik secara aktif mendekonstruksi mitos bencana alam yang diproduksi oleh narasi resmi pemerintah. Melalui tanda-tanda visual dan narasi tandingan, masyarakat mampu menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi dan konflik satwa liar di Sumatra memiliki akar yang dalam pada struktur politik-ekonomi yang ekstraktif.

Tanda-tanda seperti kayu gelondongan di tengah banjir atau penyusutan habitat gajah di Tesso Nilo menjadi penanda yang tak terbantahkan dari kegagalan sistemik dalam pengelolaan hutan dan tata ruang. Meskipun media sosial membawa tantangan berupa hiperrealitas dan degradasi makna, perannya sebagai ruang dokumentasi alternatif sangat krusial untuk melakukan repolitisasi terhadap isu lingkungan. Publik tidak lagi melihat bencana sebagai takdir yang harus diterima dengan pasrah, melainkan sebagai konsekuensi dari keputusan manusia dan kebijakan negara yang dapat diubah.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi media dan ekologi bagi jurnalis warga serta aktivis agar pesan-pesan kritis mengenai akar struktural bencana dapat disampaikan dengan lebih efektif dan berbasis data. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk meninggalkan strategi komunikasi yang defensif dan depolitisir, serta mulai menghadapi akuntabilitas struktural dengan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin konsesi yang merusak benteng ekologis Sumatra. Bencana bukanlah musibah yang turun dari langit; ia adalah cermin dari kebijakan kita di atas tanah yang kita huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, dkk. (2025). Pesan Jurnalisme Bencana dalam Foto: Analisis Semiotika Roland Barthes pada Evakuasi Korban Likuefaksi Palu 2018. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*.
- Barthes, R. (1972). *Mythologies*. Hill and Wang.
- Blaikie, P. (1985). *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. Longman.
- Budiman, K. (2004). *Semiotika Visual: Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas*. Jalasutra.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. SAGE.
- Hardiansyah Padli. (2025). Membaca Bencana Sumatra melalui Ekologi Politik. *Kumparan*.
- Husni. (2025). Media Framing of Floods in Indonesia: Ecological Silences and Systemic Issues. *Communica: Journal of Communication*.
- Mongabay. (2025). Indonesia Closes 2025 with Rising Disasters and Stalled Environmental Reform. *Mongabay News*.
- Piliang, Y. A. (2003). *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies atas Matinya Makna*. Jalasutra.
- Riau Media Center. (2025). Krisis Gajah Tesso Nilo: BBKSDA Riau Ungkap 23 Kematian Akibat Kerusakan Habitat.
- Robbins, P. (2004). *Political Ecology: A Critical Introduction*.
- Sobur, A. (2016). *Semiotika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Stoler, A. L. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt*.

WALHI. (2025). Laporan Krisis Ekologis Sumatra 2025: Bencana Sebagai Pilihan Politik.